

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Polisi akan Blokir Surat Kendaraan Mewah Beridentitas “Palsu”

Inge Klara Safitri

Inge.klara@tempo.co.id

JAKARTA — Kepolisian Daerah Metro Jaya akan memblokir surat-surat kendaraan mewah penunggak pajak yang menggunakan kartu identitas asli tapi palsu (aspal). Petugas mengetahui kendaraan mewah berdokumen “aspal” itu ketika menagih tunggakan pajak ke alamat yang tercantum pada surat kendaraan.

Kepala Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas, Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Sumardji, mengatakan selama ini tidak ada keharusan untuk memastikan kecocokan identitas dan alamat pemilik kendaraan ketika mereka mendaftarkan balik nama dan pajak. “Berdasarkan substansi aturan, kami tidak berhak bertanya kekayaan pendaftar,” kata Sumardji saat dikonfirmasi, kemarin.

Badan Pajak mencatat setidaknya ada lima kendaraan mewah yang pemiliknya menggunakan kartu identitas orang lain ketika menagih tunggakan pajak dari pintu ke pintu baru-baru ini. Karena banyaknya kasus pe-

minjaman identitas untuk pembelian kendaraan mewah, menurut Sumardji, kepolisian berencana membantu Badan Pajak.

Polisi akan memastikan dan mendatangi rumah orang yang tercatat sebagai pemilik kendaraan penunggak pajak. Polisi akan mendatangi alamat berdasarkan fotokopi kartu identitas yang dilampirkan saat pendaftaran kendaraan. Jika pemilik kartu identitas terbukti bukan pemilik kendaraan tersebut, kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) akan memblokir surat-surat pembayaran pajak secara otomatis.

Pemblokiran itu, kata Sumardji, otomatis akan membuat pemilik tidak bisa mengurus pajak dan memperpanjang surat-surat kendaraannya. “Akan kami cari pemilik aslinya dan meminta langsung melakukan bea balik nama nomor kendaraan bermotornya,” ujar dia.

Sumardji juga mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan meminjamkan kartu identitas kepada orang lain. Dia juga mempersilakan pemilik kartu identitas asli yang dirugikan untuk melapor ke polisi. Sedangkan pemin-

jam kartu bisa dikenai pidana penyalahgunaan identitas bila pemilik identitas asli merasa dirugikan dan melapor ke polisi.

Sebelumnya, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, mengatakan kerap kesulitan melacak dan menagih pajak kendaraan mewah karena pemiliknya menggunakan kartu identitas dan alamat orang lain. Faisal pun telah mengadakan masalah ini ke Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

Menurut Faisal, Badan Pajak perlu menggandeng kepolisian guna mengatasi penggunaan identitas “aspal” untuk pembelian kendaraan mewah itu. Sebab, Badan Pajak hanya mengurus administrasi seperti pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB).

Penggunaan identitas milik orang lain, kata Faisal, berpotensi menghambat penerimaan pajak. “Pajak yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan, tapi dilimpahkan ke orang lain,” ujar dia.

Badan Pajak juga berencana melacak ken-

daraan mewah penunggak pajak lewat kamera pengintai atau *closed-circuit television* (CCTV). Untuk itu, Badan Pajak akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Teknologi, dan Informasi DKI Jakarta agar bisa mengakses data seluruh CCTV di Ibu Kota.

Pelacakan melalui CCTV, kata Faisal, dilakukan karena kesadaran pemilik kendaraan mewah untuk membayar pajak masih rendah. Tercatat ada 2.751 unit kendaraan mewah yang menunggak pajak lebih dari Rp 20 juta. Total tunggaknya sekitar Rp 91,8 miliar.

Badan Pajak juga akan melacak sebanyak 13.515 unit kendaraan biasa yang menunggak pajak sebesar Rp 10-20 juta. Total tunggakan pajak kendaraan non-mewah itu sekitar Rp 178,5 miliar. “Kami kesulitan mendata kendaraan tertunggak karena banyak yang sudah berpindah tangan,” kata Faisal.

Sejauh ini, Faisal belum merinci bagaimana pelacakan melalui CCTV itu akan dijalankan. “Nanti koordinasi dengan Ditlantas Polda Metro juga. Termasuk dengan swasta yang memiliki CCTV,” kata dia.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Polisi akan Blokir Surat Kendaraan Mewah Beridentitas “Palsu”

Tunggakan yang Melambung

TUNGGAKAN pajak kendaraan bermotor atau PKB terus terjadi, bahkan dilakukan oleh badan usaha atau pemilik kendaraan yang tergolong mewah. Nilai tunggakan oleh pemilik sepeda motor malah kecil. Berikut ini data tunggakan pajak dari berbagai jenis kendaraan tahun ini yang dapat dihimpun *Tempo*:

- Tunggakan PKB pokok Rp 10-20 juta: 13.515 unit senilai **Rp 178,5 miliar**
 - Jip: 3.557 unit, tunggakan **Rp 46,8 miliar**
 - *Dump truck*, truk tangki 886 unit, tunggakan: **Rp 11,1 miliar**
 - Alat berat: 790 unit, tunggakan: **Rp 10 miliar**
 - Sedan: 3.787 unit, tunggakan: **Rp 51,8 miliar**
 - Pikap, *light truck*, dan truk 57 unit, tunggakan: **Rp 656 juta**
 - Sepeda motor 131 unit, tunggakan: **Rp 1,6 miliar**
 - Minibus, mikrobus, bus, *combi* 4.189 unit, tunggakan **Rp 54,8 miliar**
 - *Bestelwagen*, boks, *delvan* 118 unit, tunggakan **Rp 1,4 miliar**
- Tunggakan PKB di atas Rp 20 juta: 2.751 unit senilai **Rp 91,8 miliar**
 - Jip: 966 unit, tunggakan: **Rp 28,2 miliar**
 - *Dump truck*, truk tangki: 17 unit, tunggakan: **Rp 448 juta**
 - Alat berat: 58 unit, tunggakan: **Rp 1,9 miliar**
 - Sedan: 1.380 unit, tunggakan: **Rp 52,3 miliar**
 - Pikap, *light truck*, truk: 9 unit, tunggakan: **Rp 255 juta**
 - Sepeda motor: 8 unit, tunggakan: **Rp 668 juta**
 - Minibus, mikrobus, bus, *combi*: 302 unit, tunggakan: **Rp 7,5 miliar**
 - *Bestelwagen*, boks, *delvan*: 11 unit, tunggakan: **Rp 327 juta**

■ Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak DKI

- **PKB +2019**
 - Rencana: **Rp 8,8 triliun**
 - Realisasi: **Rp 1,1 triliun**
- +2018**
 - Rencana: **Rp 8,35 triliun**
 - Realisasi (Februari 2018): **Rp 1,03 triliun**
- +Selisih *year on year* (yoy): **Rp 67,5 miliar**
- **BBNKB +2019**
 - Rencana: **Rp 5,4 triliun**
 - Realisasi : **Rp 652,9 miliar**
- +2018**
 - Rencana: **Rp 5,1 triliun**
 - Realisasi (Februari 2018): **Rp 680 miliar**
- +Selisih yoy: **-(Rp 27 miliar)**

SUMBER: BPRD DKI INGE KLARA SAFITRI